

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT <u>REPUBLIK INDONESIA</u>

LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI (BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)

Tahun Sidang Masa Persidangan		2021- 2022 V
Rapat Jenis Rapat Dengan	:	Ke - 12 (Dua Belas) Rapat Dengar Pendapat Direktur Utama MIND-ID, Dirut PT Antam, Tbk, dan Dirut PT Vale Indonesia, Tbk
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal Waktu Tempat	::	Kamis, 2 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB s.d 17.50 WIB Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	:	 Progres dan target kinerja PT Vale Indonesia, Tbk Progres pembangunan industri baterai untuk komponen electric vehicle Lain-lain
Ketua Rapat	:	Bambang Haryadi, SE
		(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	:	 A. Pemerintah 1. Direktur Utama MIND-ID, 2. Dirut PT Antam, Tbk 3. Dirut PT Vale Indonesia, Tbk
		B. 34 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
		22 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
		12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
		18 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

 Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 2 Juni 2022 dibuka pukul 15.00 WIB, dipimpin oleh Bambang Haryadi, SE, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

- Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres dan target kinerja PT Vale Indonesia, Tbk
 - b. Progres pembangunan industri baterai untuk komponen electric vehicle
 - c. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

- Komisi VII DPR RI akan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk oleh PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 20%, termasuk pelepasan saham sebesar 20% melalui *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 1990.
- 2. Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja), akan melakukan pendalaman terkait manfaat yang diperoleh Pemerintah dan masyarakat di sekitar Wilayah Operasi selama PT Vale Indonesia Tbk beroperasi (± 54 Tahun). Untuk itu Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak melakukan proses perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia Tbk yang akan berakhir pada 28 Desember 2025, sebelum seluruh permasalahan yang mengemuka saat ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Komisi VII DPR RI mendukung upaya Dirut MIND-ID dan Dirut PT Antam Tbk untuk melakukan hilirisasi produk nikel, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional dalam pembangunan ekosistem Industri Baterai Listrik Nasional.

4. Komisi VII DPR RI meminta Dirut MIND-ID, Dirut PT Antam Tbk, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 9 Juni 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.50 WIB

